

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA DAERAH KOTA MALANG

¹Dimas Wisnu Adrianto, ²Deny Dwi Cahyono, ³Eko budi Valianto

^{1,2}Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Brawijaya

³Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang

e-mail: ¹d.adrianto@ub.ac.id, ³litbangkotamlg@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.58411/pangripta.v6i1.188>

Abstrak: Pengukuran Indikator Kinerja Daerah (IKD) dimaksudkan untuk mengidentifikasi ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada dokumen Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 terdapat perubahan target pada beberapa Indikator Kinerja Daerah yang didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan Tahun 2020, serta intervensi target karena adanya pandemi Covid-19 yang belum terprediksi berakhirnya. Pengukuran Indikator Kinerja Daerah Kota Malang pada Tahun 2022 ini diharapkan dapat menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur capaian sembilan indikator kinerja daerah, yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Persentase Penurunan PPKS, Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pembangunan Masyarakat, dan Indeks Modal Sosial. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis pengukuran capaian sembilan indikator kinerja daerah. Hasil dari analisis ini, yaitu terdapat tiga indikator yang telah memenuhi target Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023, yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pendidikan, dan Indeks Kesehatan. Sementara itu, enam indikator lainnya masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Kata kunci: Indikator Kinerja Daerah, Capaian Target, Kota Malang

Abstract: Measurement of Regional Performance Indicators (IKD) is intended to identify measures of success in achieving the vision and mission of regional heads and deputy regional heads which are designated as regional Main Performance Indicators (IKU) and performance indicators for regional governance. In the Malang City RPJMD Amendment document for 2018-2023 there are changes in targets on several Regional Performance Indicators based on the results of evaluation of performance achievements up to 2020, as well as targeted interventions due to the Covid-19 pandemic which has not yet been predicted to end. The measurement of Malang City Regional Performance Indicators in 2022 is expected to be able to describe the performance of local governments in general in the implementation of regional government affairs. The purpose of this study was to measure the achievements of nine regional performance indicators, namely the Human Development Index, Poverty Rate, PPKS Reduction Percentage, Gender Development Index, Community Development Index, and Social Capital Index. The analysis technique used is an analysis of the measurement of the results of nine regional performance indicators. The results of this analysis are that there are three indicators that have met the target of changing the Malang City RPJMD for 2018-2023, namely the Human Development Index, the Education Index, and the Health Index. Meanwhile, six other indicators still have not met the set targets.

Keywords: Regional Performance Indicators, Achievements Targets, Malang City

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Pemerintah Kota Malang telah menyusun dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2018-2023 dimana tujuan dari dokumen Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 adalah sebagai penyaluran sasaran prioritas pembangunan daerah dengan sasaran, prioritas pembangunan nasional

dan penyaluran program dan kegiatan strategis daerah dengan program dan kegiatan strategis prioritas nasional. Dokumen Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 diharapkan dapat memudahkan dalam perwujudan 'Kota Malang Bermartabat' sebagai visi Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang Periode 2018-2023.

Pada dokumen Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023, arah

kebijakan pembangunan Kota Malang pada periode tahun ke-4 (empat) masih sama dengan tahun ke-3 (tiga) yaitu mengarah kepada akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya, menjaga daya beli dan perlindungan sosial, infrastruktur perekonomian dan sarana prasarana sosial, pemantapan industri kreatif masyarakat dan kemandirian sosial ekonomi.

Pengukuran Indikator Kinerja Daerah (IKD) dimaksudkan untuk mengidentifikasi ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dimana rencana kinerja merupakan gambaran penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa kini maupun yang akan datang.

Pada dokumen Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 terdapat perubahan target pada beberapa Indikator Kinerja Daerah yang didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan Tahun 2020, serta intervensi target karena adanya pandemi Covid-19 yang belum terprediksi berakhirnya.

Pengukuran Indikator Kinerja Daerah Kota Malang pada Tahun 2022 ini diharapkan dapat menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Selain itu, juga sekaligus untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor determinan yang berpengaruh pada capaian komponen indikator kinerja daerah Kota Malang yang meliputi pengukuran 9 *item* indeks. Adapun cakupan Indikator Kinerja Daerah Kota Malang yang

harus dilakukan evaluasi dan analisis adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia;
2. Indeks Pendidikan;
3. Indeks Kesehatan;
4. Indeks Daya Beli;
5. Angka Kemiskinan;
6. Persentase Penurunan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial);
7. Indeks Pembangunan Gender;
8. Indeks Pembangunan Masyarakat; dan
9. Indeks Modal Sosial.

Berdasarkan dokumen Pengukuran Indikator Kinerja Daerah Tahun 2021, tiga indeks yang melampaui target Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 adalah Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Indeks Daya Beli, sedangkan enam indeks lainnya tidak sesuai target. Sementara itu, enam indeks lainnya tidak memenuhi target, yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Persentase Penurunan PPKS, Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pembangunan Masyarakat, dan Indeks Modal Sosial.

Pada Tahun 2020, yaitu pada era pandemi Covid-19, komponen Indikator Kinerja Daerah Kota Malang tentunya mengalami pasang surut akibat pengaruh dari kondisi tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi 9 *item* indeks sehingga dapat menghasilkan arahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah Kota Malang yang tepat untuk ke depannya.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan kegiatan penelitian Pengukuran Indikator Kinerja Daerah Kota Malang adalah:

- a. Mengidentifikasi capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2021 dan memproyeksikan Tahun 2022-2023 berdasarkan data BPS, meliputi Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, Indeks Daya Beli, Angka

- Kemiskinan, Persentase Penurunan PPKS, dan Indeks Pembangunan Gender;
- Mengukur capaian indikator kinerja daerah Tahun 2022 pada Indeks Pembangunan Masyarakat dan Indeks Modal Sosial sampai pada tingkat kecamatan melalui pengukuran data primer hasil survei;
 - Mengevaluasi target dan capaian Indikator Kinerja Daerah Kota Malang Tahun 2021 berdasarkan acuan pada Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023.

METODE

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit dari beberapa indeks komponennya. Komponen IPM, antara lain:

- Angka Harapan Hidup pada Waktu Lahir
- Rata-rata lama sekolah (RLS/MYS)
- Harapan Lama Sekolah
- Konsumsi per Kapita

Hasil perhitungan capaian IPM dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah dengan nilai sebagai berikut.

Tabel 1. Klasifikasi Capaian IPM

Klasifikasi	Capaian IPM
Sangat tinggi	$IPM \geq 80$
Tinggi	$70 \leq IPM < 80$
Sedang	$60 \leq IPM < 70$
Rendah	$IPM < 60$

Sumber: Badan Pusat Statistik (2015)

2. Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan adalah rata-rata penjumlahan indeks melek huruf dengan indeks rata-rata lama sekolah. Indikator yang digunakan dalam perhitungan indeks pendidikan adalah rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah. Data yang digunakan dalam perhitungan indikator pendidikan, yaitu jumlah guru, jumlah

murid, jumlah sekolah, dan jumlah ruang kelas.

3. Indeks Kesehatan

Angka Harapan Hidup merupakan instrumen dalam evaluasi kinerja pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diselaraskan dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

4. Indeks Daya Beli

Indeks Daya Beli merupakan salah satu dimensi dari Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Daya Beli dinilai berdasarkan standar hidup layak yang diukur pada paritas daya beli/PPP dan penghasilan. *Purchasing Power Parity* (PPP) atau kemampuan daya beli masyarakat yang diukur berdasarkan konsumsi perkapita riil.

5. Angka Kemiskinan

Badan Pusat Statistik mengatakan bahwa untuk mengukur kemiskinan, menggunakan konsep memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Evaluasi angka kemiskinan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik. Kemudian dilakukan perbandingan perubahan angka kemiskinan mulai dari Tahun 2018 hingga Tahun 2021. Penyebab dari perubahan angka tersebut juga akan diidentifikasi berdasarkan hasil survei sekunder yang telah dilaksanakan.

6. Persentase Penurunan PPKS

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perorangan, keluarga, atau komunitas yang

mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya, sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Persentase penurunan PPKS dianalisis berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 111/HUK/2009 tentang Indikator Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

7. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Gender diartikan sebagai perbedaan fungsi dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Indeks Pembangunan Gender dihitung berdasarkan umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Keseluruhan indikator dalam perhitungan IPG dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

8. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)

Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) dijadikan sebagai tolok ukur (*benchmark*) dalam mengukur kemajuan capaian pembangunan masyarakat dan gambaran mengenai kondisi pembangunan masyarakat. Nilai IPMas dihitung dengan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing dimensi indeks. Pendekatan nilai rata-rata tertimbang digunakan untuk memperoleh nilai masing-masing dimensi indeks.

9. Indeks Modal Sosial (IMS)

Modal sosial merupakan sumber daya yang melekat pada hubungan sosial. Modal sosial selalu ada dalam setiap hubungan sosial yang dilakukan antar individu, antar kelompok, antar organisasi atau bahkan antar negara. Semakin besar cakupan modal sosial yang ingin diteliti, maka semakin kompleks indikator yang digunakan untuk mengukur besaran modal sosial tersebut. Indeks modal sosial yang dihasilkan terbentuk dari tujuh faktor,

yaitu sikap percaya, toleransi agama, toleransi suku, resiprositas, partisipasi dalam aksi bersama, partisipasi dalam kelompok, dan jejaring.

Besaran modal sosial juga dapat dibedakan berdasarkan status bekerja dan tingkat pendidikan. Hal ini diduga karena orang yang bekerja mempunyai jejaring lebih luas daripada orang yang tidak bekerja. Namun sebaliknya, tingkat pendidikan mempunyai hubungan negatif dengan besaran modal sosial. Kemungkinan hal tersebut terjadi karena proporsi penduduk yang bekerja lebih banyak terdapat di daerah pedesaan yang tingkat pendidikannya relatif lebih rendah dari perkotaan.

Selain itu, modal sosial juga dapat dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Kemudian, jika dilihat menurut umur, semakin tua seseorang, maka semakin tinggi besaran indeks modal sosial. Penduduk yang berstatus kawin ataupun cerai juga mempunyai indeks modal sosial yang lebih tinggi daripada mereka yang belum kawin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indikator Kinerja Daerah Kota Malang diukur dengan menilai sembilan indikator, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, Indeks Daya Beli, Angka Kemiskinan, Persentase Penurunan PPKS, Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas), dan Indeks Modal Sosial (IMS).

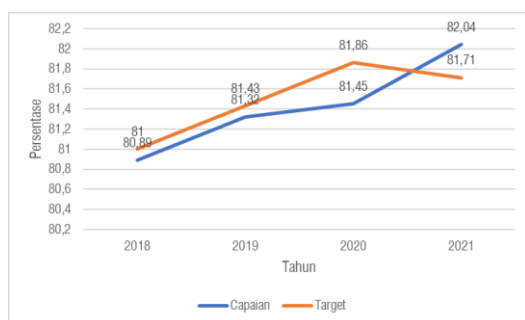
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Pengukuran dimensi kesehatan menggunakan angka harapan hidup waktu lahir. Pengukuran dimensi

pengetahuan menggunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Pengukuran dimensi hidup layak menggunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok.

Indeks Pembangunan Manusia Kota Malang (IPM) mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. IPM Kota Malang terendah adalah pada Tahun 2018 sebesar 80,89, sedangkan IPM tertinggi pada Tahun 2021 sebesar 82,04. Capaian IPM Kota Malang mengalami kenaikan sebesar 0,59 pada Tahun 2021.

Berikut merupakan perbandingan capaian IPM dengan target pada Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023.



Gambar 1. Capaian Indeks Pembangunan Manusia terhadap Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023

Capaian IPM Kota Malang telah melampaui target sejak tahun 2020. Pada tahun 2021 IPM Kota Malang berada pada angka 82,04 yang melampaui target sebesar 81,71. Selisih capaian IPM dengan target pada RPJMD sebesar 0,33%. IPM yang telah melampaui target tersebut menunjukkan pembangunan Kota Malang telah berjalan dengan baik.

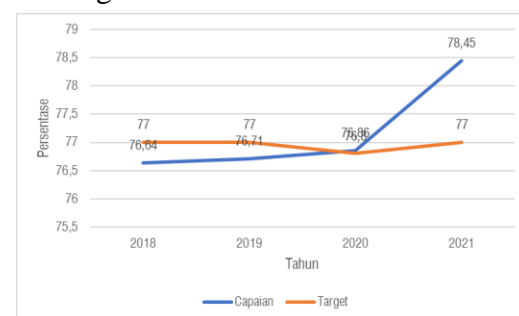
2. Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan bidang pendidikan. Indeks pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan di bidang pendidikan yang mempunyai kedudukan strategis, mengingat kualitas sumber daya manusia yang tercermin didalamnya

sangat menentukan tingkat produktivitas suatu bangsa.

Indeks Pendidikan Kota Malang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Indeks Pendidikan Kota Malang terendah adalah pada Tahun 2018 sebesar 76,64, sedangkan Indeks Pendidikan Kota Malang tertinggi pada Tahun 2021 sebesar 78,45. Capaian Indeks Pendidikan Kota Malang mengalami kenaikan sebesar 1,43 pada tahun 2021. Kenaikan capaian indeks pendidikan Kota Malang menunjukkan pembangunan di bidang pendidikan terus mengalami perbaikan meskipun sedang dilanda pandemi COVID-19.

Berikut merupakan perbandingan capaian indeks pendidikan dengan target pada Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023.



Gambar 2. Capaian Indeks Pendidikan terhadap Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023

Capaian indeks pendidikan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun capaian tersebut masih belum memenuhi target indeks pendidikan yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018 - Tahun 2023. Hal ini menunjukkan pembangunan di bidang pendidikan perlu dipacu untuk memenuhi target. Masyarakat Kota Malang telah memiliki minat yang terhadap pendidikan.

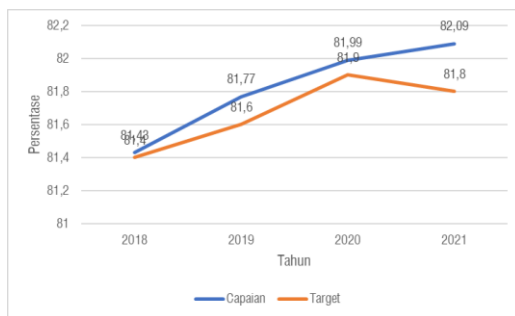
3. Indeks Kesehatan

Indeks kesehatan adalah indikator yang menggambarkan kemajuan pembangunan kesehatan. Angka harapan hidup menjadi tolak ukur yang penting dalam kependudukan sebagai

salah satu indikator dalam pengukuran kualitas penduduk.

Indeks Kesehatan Kota Malang mengalami peningkatan pencapaian dalam kurun waktu empat tahun. Pada tahun 2021 capaian Indeks Kesehatan Kota Malang menjadi yang tertinggi dengan angka 82,09. Indeks kesehatan Kota Malang pada Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,10 dari Tahun 2020. Peningkatan capaian indeks kesehatan tersebut dapat diraih karena diterapkannya berbagai kebijakan di bidang kesehatan. Hal ini menunjukkan pembangunan di bidang kesehatan telah mengalami peningkatan.

Berikut merupakan perbandingan capaian indeks kesehatan dengan target pada Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023.



Gambar 3. Capaian Indeks Kesehatan terhadap Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023

Capaian indeks kesehatan Kota Malang telah melampaui target sejak Tahun 2018. Pada Tahun 2021 indeks kesehatan Kota Malang sebesar 82,09 dan melampaui target sebesar 81,80. Capaian indeks kesehatan tersebut didukung oleh strategi dan kebijakan yang diterapkan terutama pada masa pandemi Covid-19. Diharapkan capaian Indeks Kesehatan Kota Malang terus meningkat dan terus melampaui target.

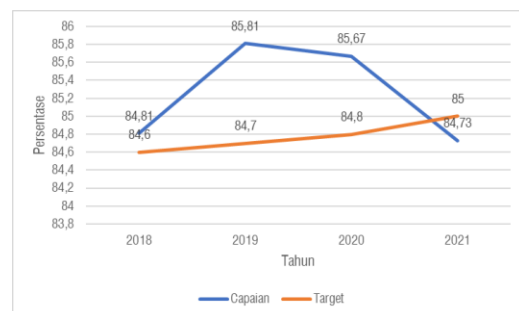
4. Indeks Daya Beli

Indeks daya beli adalah indeks yang mengukur standar hidup layak dengan menghitung kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok. Indeks Daya Beli dinilai berdasarkan standar hidup layak

yang diukur pada paritas daya beli/PPP dan penghasilan. *Purchasing Power Parity* (PPP) atau kemampuan daya beli masyarakat yang diukur berdasarkan konsumsi perkapita riil.

Capaian Indeks Daya Beli Kota Malang cenderung fluktuatif dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Indeks daya beli Kota Malang tertinggi sebesar 85,81 pada Tahun 2019, sedangkan indeks daya beli terendah sebesar 84,73 pada Tahun 2021. Pada Tahun 2021, indeks daya beli Kota Malang mengalami penurunan sebesar 0,94. Capaian indeks daya beli yang menurun pada Tahun 2021 menunjukkan daya beli masyarakat masih belum pulih dari pandemi Covid-19 yang mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat Kota Malang.

Berikut merupakan perbandingan capaian indeks daya beli dengan target pada Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023.



Gambar 4. Capaian Indeks Daya Beli terhadap Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023

Capaian Indeks Daya Beli Kota Malang yang cenderung fluktuatif telah memenuhi target sejak tahun 2018. Indeks daya beli belum melampaui target menunjukkan menunjukkan daya beli masyarakat masih dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang berdampak kepada kemampuan daya beli masyarakat Kota Malang.

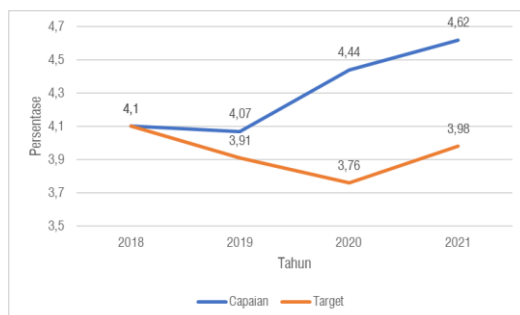
5. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan

mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dalam mengukur kemiskinan digunakan konsep pemenuhan kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Angka kemiskinan Kota Malang mengalami penurunan pada Tahun 2019. Namun angka kemiskinan Kota Malang cenderung mengalami kenaikan sejak Tahun 2020. Pada Tahun 2021, angka kemiskinan Kota Malang mengalami kenaikan sebesar 0,18%. Garis kemiskinan Kota Malang berada pada Rp.570.238,00 yang berarti masyarakat dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan termasuk dalam kategori penduduk miskin. Angka kemiskinan Kota Malang pada Tahun 2021 sebesar 4,62% atau sebanyak 40.620 penduduk Kota Malang termasuk dalam kategori penduduk miskin.

Berikut merupakan perbandingan capaian angka kemiskinan dengan target pada Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023.



Gambar 5. Capaian Angka Kemiskinan terhadap Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023

Apabila dibandingkan dengan target angka kemiskinan pada Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023, capaian angka kemiskinan masih tinggi. Hal tersebut dapat terjadi akibat munculnya kondisi yang tidak dapat dikendalikan seperti pandemi Covid-19 yang berdampak pada tingginya tingkat pengangguran.

Perlu diterapkannya kebijakan tepat guna untuk menekan angka kemiskinan Kota Malang agar dapat memenuhi target sesuai RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023.

6. Persentase Penurunan PPKS

PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Penetapan indikator kinerja pembangunan bidang kesejahteraan sosial bertujuan untuk mengukur kinerja pembangunan kesejahteraan sosial secara kuantitatif dan/atau kualitatif berupa masukan, proses, hasil, manfaat, dan dampak pembangunan.

Persentase penurunan PPKS memiliki grafik yang berfluktuasi. Pada Tahun 2018, jumlah PPKS bertambah sebesar 1,48% lalu berkurang sebesar 3,31% pada Tahun 2019. Pada tahun 2020, jumlah PPKS kembali bertambah sebesar 1,08%. Jumlah PPKS kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 0,42%. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat kesadaran PPKS, terbatasnya ketersediaan sarana panti sosial, dan belum optimalnya kemitraan lintas sektoral. Selain itu, pandemi Covid-19 masih menjadi salah satu faktor penyebab peningkatan jumlah PPKS di Kota Malang akibat banyaknya jumlah pemutusan hubungan kerja.

Berikut merupakan perbandingan capaian persentase penurunan PPKS dengan target pada Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023.



Gambar 6. Capaian Persentase Penurunan PPKS terhadap Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023

Realisasi persentase penurunan PPKS masih berada di bawah target yang ditetapkan oleh Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023. Pada Tahun 2018, persentase penurunan PPKS berada di atas target dengan selisih sebesar 0,77%. Akan tetapi, pada tahun selanjutnya, capaian tersebut berada di bawah target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19, sehingga jumlah PPKS mengalami peningkatan, khususnya untuk jumlah pengemis. Selain itu, kurangnya perlindungan pada anak juga menyebabkan masih ditemukannya kasus anak yang diperlakukan salah di Kota Malang.

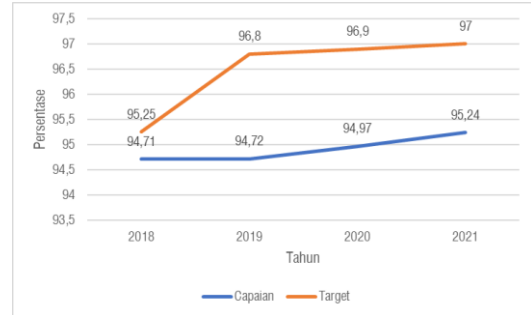
7. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Komponen pembentuk tersebut sama dengan yang digunakan dalam pengukuran IPM, yakni angka harapan hidup (mewakili dimensi kesehatan), angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah (mewakili dimensi pengetahuan), serta sumbangan pendapatan (mewakili dimensi ekonomi) yang disajikan menurut jenis kelamin.

IPG Kota Malang terus mengalami peningkatan mulai dari Tahun 2018 hingga Tahun 2021. Pada Tahun 2020, IPG Kota Malang sebesar 94,97%. Kemudian pada Tahun 2021, IPG Kota Malang meningkat menjadi 95,24%.

Selisih capaian IPG Kota Malang dari tahun 2020 sebesar 0,27%

Berikut merupakan perbandingan capaian Indeks Pembangunan Gender dengan target pada Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023.



Gambar 7. Capaian Indeks Pembangunan Gender terhadap Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023

Indeks Pembangunan Gender belum melampaui target pada Tahun 2018 hingga Tahun 2021. Pada Tahun 2021, selisih antara capaian dengan target sebesar 1,68%. Hal ini disebabkan masih terdapat pengesampingan hak perempuan bagi kalangan tertentu, sehingga perlu adanya upaya tambahan untuk terus meningkatkan nilai IPG di Kota Malang. Program yang dapat dilakukan untuk mencapai target IPG berupa pelibatan perempuan pada setiap kegiatan agar dapat menambah tingkat partisipasi wanita.

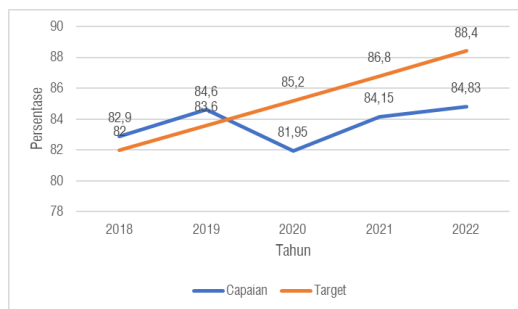
8. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)

Indeks Pembangunan Masyarakat dapat dilihat dari gotong royong, toleransi dan rasa aman. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) dijadikan sebagai tolok ukur (*benchmark*) dalam mengukur kemajuan capaian pembangunan masyarakat dan gambaran mengenai kondisi pembangunan masyarakat Indonesia.

Persentase IPMas mengalami kenaikan pada Tahun 2022 menjadi 84,83%. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,68%. Peningkatan nilai IPMas disebabkan

oleh adanya peningkatan peran masyarakat dalam berbagai kegiatan, khususnya kegiatan perbaikan kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Semakin banyak masyarakat yang turut serta dalam suatu kegiatan, maka nilai IPMas juga akan mengalami peningkatan.

Berikut merupakan perbandingan capaian Indeks Pembangunan Masyarakat dengan target pada Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023.



Gambar 8. Capaian Indeks Pembangunan Masyarakat terhadap Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023

Capaian Indeks Pembangunan Masyarakat telah melampaui target pada tahun 2018 hingga tahun 2019, tetapi kembali berada di bawah target pada tahun 2020 hingga tahun 2022. Hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19, sehingga tingkat keterlibatan masyarakat dalam sebuah kegiatan menjadi menurun dan menyebabkan capaian IPMas juga menurun. Selain itu, kurangnya rasa aman akibat rendahnya penegakan hukum baik dalam bermasyarakat maupun berinvestasi juga mempengaruhi tingkat indeks rasa aman di Kota Malang.

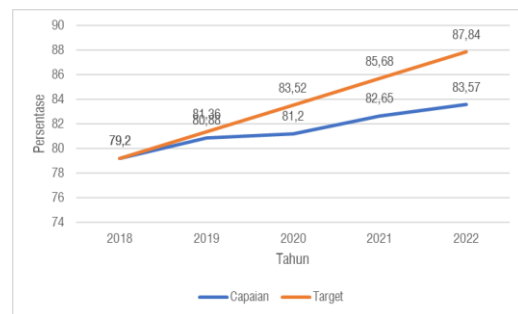
9. Indeks Modal Sosial (IMS)

Modal sosial merupakan sumber daya yang melekat pada hubungan sosial. Indeks modal sosial yang dihasilkan terbentuk dari tujuh faktor, yaitu: sikap percaya, toleransi agama, toleransi suku, resiprositas, partisipasi dalam aksi bersama, partisipasi dalam kelompok, dan jejaring.

Capaian IMS Kota Malang terus mengalami peningkatan pada Tahun

2018 hingga Tahun 2022. Pada Tahun 2022, nilai IMS Kota Malang sebesar 83,57%. Nilai ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0,92%. Peningkatan nilai IMS ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Malang memiliki kesadaran individu yang tinggi dalam kehidupan sosial di masyarakat. Nilai IMS dapat terus ditingkatkan dengan mendorong keikutsertaan masyarakat dalam berbagai kegiatan bersama. Apabila nilai IMS masyarakat Kota Malang semakin tinggi, maka efektivitas pembangunan Kota Malang juga akan semakin meningkat.

Berikut merupakan perbandingan capaian Indeks Modal Sosial dengan target pada Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023.



Gambar 9. Capaian Indeks Modal Sosial terhadap Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023

Capaian Indeks Modal Sosial masih belum melampaui target yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023. Pada Tahun 2022, selisih antara capaian dengan target sebesar 4,17%. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya penguatan modal sosial masyarakat Kota Malang. Penguatan modal sosial dapat dilakukan dengan cara menambah kegiatan yang berbasis kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat dengan aktif mengikuti kegiatan tersebut.

KESIMPULAN

Indikator Kinerja Daerah merupakan alat ukur spesifik yang secara kuantitatif dan atau kualitatif

menjadi dampak yang dapat menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Terdapat 23 indikator kinerja daerah yang dapat memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Indikator Kinerja Daerah yang diukur pada kegiatan ini sebanyak sembilan indikator. Indikator tersebut antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, Indeks Daya Beli, Persentase Penurunan PPKS, Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks

Pembangunan Masyarakat (IPMas), dan Indeks Modal Sosial. Terdapat tiga indikator yang telah memenuhi target yaitu IPM, Indeks Kesehatan, dan Indeks Daya Beli. Sedangkan indikator yang belum terpenuhi yaitu Indeks Pendidikan, Angka Kemiskinan, Persentase Penurunan PPKS, Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pembangunan Masyarakat, dan Indeks Modal Sosial. Berikut merupakan tabel kesimpulan kegiatan penelitian Pengukuran Indikator Kinerja Daerah Kota Malang Tahun 2022.

Tabel 2 Kesimpulan

Indikator	Target	Capaian	Analisis Deskriptif
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,71	82,04	Capaian IPM yang sangat tinggi menunjukkan masyarakat Kota Malang dapat mengakses pembangunan untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Hal ini didukung oleh faktor pembentuk IPM dengan meningkatnya angka harapan hidup, peningkatan angka melek huruf dan rata-rata lama waktu sekolah, serta kemampuan daya beli masyarakat yang semakin meningkat.
Indeks Pendidikan	77,00	78,45	Capaian indeks pendidikan Kota Malang selaras dengan fungsi Kota Malang yang utama yaitu sebagai kota pendidikan. Pemerataan pembangunan di bidang pendidikan terus dilakukan untuk meningkatkan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah yang berpengaruh pada peningkatan indeks pendidikan.
Indeks Kesehatan	81,80	82,09	Peningkatan capaian indeks kesehatan tersebut dapat diraih karena diterapkannya berbagai kebijakan di bidang kesehatan. Hal ini menunjukkan pembangunan di bidang kesehatan telah mengalami peningkatan.
Indeks Daya Beli	85,00	84,73	Capaian Indeks Daya Beli Kota Malang yang cenderung fluktuatif telah memenuhi target sejak tahun 2018. Indeks daya beli belum melampaui target menunjukkan daya beli masyarakat masih dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang berdampak kepada kemampuan daya beli masyarakat Kota Malang.
Angka Kemiskinan	3,98	4,62	Angka kemiskinan Kota Malang mengalami penurunan pada tahun 2019. Namun angka kemiskinan Kota Malang cenderung mengalami kenaikan sejak tahun 2020. Pada tahun 2021, angka kemiskinan Kota Malang mengalami kenaikan sebesar 0,18%. Garis kemiskinan Kota Malang berada pada Rp.570.238,00 yang berarti masyarakat dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan termasuk dalam kategori penduduk miskin.
Persentase Penurunan PPKS	5,00	-0,42	Jumlah PPKS kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 0,42%. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat kesadaran PPKS, terbatasnya ketersediaan sarana panti sosial, dan belum optimalnya kemitraan lintas sektoral. Selain itu, pandemi Covid-19 masih menjadi salah satu faktor penyebab peningkatan jumlah PPKS di Kota Malang akibat banyaknya jumlah pemutusan hubungan kerja.
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,00	95,24	Pada tahun 2021, selisih antara capaian dengan target sebesar 1,76%. Hal ini disebabkan masih terdapat pengesampingan hak perempuan bagi kalangan tertentu, sehingga perlu adanya

Indikator	Target	Capaian	Analisis Deskriptif
			upaya tambahan untuk terus meningkatkan nilai IPG di Kota Malang. Program yang dapat dilakukan untuk mencapai target IPG berupa pelibatan perempuan pada setiap kegiatan agar dapat menambah tingkat partisipasi wanita.
Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	88,40	84,83	Capaian Indeks Pembangunan Masyarakat telah melampaui target pada tahun 2018 hingga tahun 2019, tetapi kembali berada di bawah target pada tahun 2020 hingga tahun 2022. Hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19, sehingga tingkat keterlibatan masyarakat dalam sebuah kegiatan menjadi menurun dan menyebabkan capaian IPMas juga menurun.
Indeks Modal Sosial (IMS)	87,84	83,57	Pada tahun 2022, nilai IMS Kota Malang sebesar 83,57%. Nilai ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0,92%. Peningkatan nilai IMS ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Malang memiliki kesadaran individu yang tinggi dalam kehidupan sosial di masyarakat.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, masing-masing indikator memiliki permasalahan

masing-masing yang perlu untuk diselesaikan. Berikut merupakan rekomendasi yang disusun berdasarkan hasil analisis.

Tabel 3. Saran

Indikator	Rekomendasi
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Variabel yang paling berpengaruh untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks pendidikan. Maka, peningkatan nilai indeks pendidikan perlu dilakukan, sehingga IPM akan turut meningkat. Program yang dapat dilakukan guna meningkatkan nilai indeks pendidikan, yaitu program Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal. Pelaksanaan program ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas tenaga pendidik serta penambahan fasilitas sarana pendidikan. Selain itu, dapat juga dilakukan penggalan minat dan bakat bagi siswa, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat disesuaikan dengan potensi dari siswa tersebut.
Indeks Pendidikan	Variabel yang paling berpengaruh untuk indeks pendidikan adalah harapan lama sekolah. Peningkatan harapan lama sekolah dapat meningkatkan indeks pendidikan. Program yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan angka harapan lama sekolah yaitu program Pembinaan Pendidikan Dasar. Program ini dapat dilaksanakan melalui sosialisasi pendidikan dan pendampingan siswa dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap pendidikan tinggi.
Indeks Kesehatan	Variabel yang paling berpengaruh untuk indeks kesehatan adalah pemberian ASI. Pemberian ASI perlu dilakukan, sehingga indeks kesehatan akan turut meningkat. Program yang dapat mendukung peningkatan pemberian ASI yaitu program peningkatan kesehatan masyarakat. Program ini dapat dilaksanakan dengan sosialisasi pentingnya pemberian ASI dan perbaikan sarana-prasarana ruang laktasi.
Indeks Daya Beli	Variabel yang paling berpengaruh untuk indeks daya beli adalah pengeluaran per kapita. Hal ini menunjukkan peningkatan pengeluaran per kapita akan meningkatkan indeks daya beli. Salah satu program yang dapat dilaksanakan dalam meningkatkan pengeluaran per kapita adalah melalui program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, sehingga harga barang yang dijual pada toko maupun pasar tidak akan berbeda jauh. Selain itu, pembuatan sentra ekonomi kampung kreatif juga akan meningkatkan daya beli masyarakat Kota Malang.
Angka Kemiskinan	Variabel yang paling berpengaruh untuk angka kemiskinan adalah tingkat pengangguran terbuka. Program yang dapat dilaksanakan guna menurunkan tingkat pengangguran terbuka yaitu program Penempatan Tenaga Kerja. Program tersebut dilakukan dengan memberikan informasi seputar penempatan tenaga kerja kepada dunia usaha dan masyarakat yang akan menjadi calon tenaga kerja. Selain itu, masyarakat dapat diberikan pelatihan keterampilan kerja untuk berwirausaha. Peningkatan jumlah wirausaha juga akan berdampak kepada peningkatan jumlah lapangan kerja di Kota Malang.
Persentase	Variabel yang paling berpengaruh untuk persentase penurunan PPKS adalah korban

Indikator	Rekomendasi
Penurunan PPKS	yang diperlakukan salah. Persentase penurunan PPKS dapat ditingkatkan dengan mengurangi korban yang diperlakukan salah. Program yang mendukung adalah dengan oenegakan program Rehabilitasi Sosial terutama terhadap kaum marjinal, khususnya anak jalanan.
Indeks Pembangunan Gender	Variabel yang berpengaruh untuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Peningkatan IPG didukung oleh IPM perempuan dan IPM laki-laki melalui program peningkatan IPM berbasis gender. Program yang mendukung yaitu melalui Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak, sehingga dapat meningkatkan indeks pembangunan gender.
Indeks Pembangunan Masyarakat	Variabel yang paling berpengaruh untuk Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) adalah indeks rasa aman. Maka, peningkatan rasa aman perlu dilakukan, sehingga IPMas akan turut meningkat. Program yang dapat dilakukan yaitu program perlidungan masyarakat melalui penambahan jumlah titik jaga di Kota Malang, sehingga tingkat keamanan Kota Malang dapat mengalami peningkatan. Selain itu, kerja sama antar instansi dapat dilakukan dengan integrasi antara CCTV dari Dinas Perhubungan serta fasilitas keamanan dari kepolisian.
Indeks Modal Sosial	Variabel yang paling berpengaruh untuk Indeks Modal Sosial (IMS) adalah kelompok dan jejaring. Hal ini menunjukkan keikutsertaan masyarakat pada kelompok masyarakat sangat berpengaruh pada IMS. Program yang dapat mendukung adalah program Pemberdayaan Masyarakat melalui pemberian pemahaman kepada kelompok masyarakat terkait tugas dan fungsinya. Program tersebut dapat meningkatkan peran aktif kelompok tersebut kepada masyarakat, sehingga dapat menjaring masyarakat untuk turut berpartisipasi ke dalam kelompok tersebut. Selain itu, dapat juga dilakukan sosialisasi mengenai pentingnya toleransi dalam bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang. (2021). Pengukuran Indikator Kinerja Daerah Kota Malang. Kota Malang: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang.
- Badan Pusat Statistik. (2015). IPM Metode Baru. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Kota Malang dalam Angka Tahun 2022. Kota Malang: Badan Pusat Statistik.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2009). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 111/HUK/2009 tentang Indikator Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Pemerintah Kota Malang. (2018). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023. Kota Malang: Pemerintah Kota Malang.